

SUSTAINABLE BUSINESS POLICY BASED ON SDGS AS A STRATEGY TO STRENGTHEN AN INCLUSIVE AND COMPETITIVE BUSINESS ECOSYSTEM IN INDONESIA

Muh. Rizal S^{1*}, Aryan Agus Pratama², Alifia Ainun Rizky³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Email: rizalsuyuti@unm.ac.id; aryan.aguspratama@unm.ac.id; alifia.ainun.rizky@unm.ac.id

Abstrak. Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan tercapainya keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan tersebut karena mencakup sekitar 99% unit usaha, memberikan kontribusi sekitar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Namun, besarnya peran UMKM belum sepenuhnya diikuti kemampuan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, inovasi hijau, digitalisasi, inklusi sosial, dan efisiensi sumber daya ke dalam model bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan usaha berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) dapat digunakan sebagai strategi penguatan ekosistem bisnis yang inklusif dan berdaya saing di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap kebijakan pemerintah, laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta literatur ilmiah nasional dan internasional. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, dan triangulasi sumber. Kajian juga diperkuat dengan bukti bibliometrik berbasis VOSviewer dari penelitian terdahulu mengenai SDGs dan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan usaha berkelanjutan perlu bergerak dari pendekatan bantuan usaha menuju pembangunan ekosistem yang mengintegrasikan pembiayaan berkelanjutan, digitalisasi, inovasi, rantai nilai inklusif, ekonomi sirkular, penguatan kapasitas sumber daya manusia, standarisasi, serta kemitraan pemerintah-swasta-akademisi-masyarakat. Penelitian menemukan lima pilar strategis, yaitu kebijakan dan tata kelola, pembiayaan berkelanjutan, transformasi digital dan inovasi, inklusi rantai nilai, serta ekonomi hijau dan sirkular. Penguatan kelima pilar tersebut dapat meningkatkan kemampuan usaha dalam menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial dan lingkungan. Dengan demikian, implementasi SDGs tidak seharusnya diposisikan sebagai agenda tambahan bagi dunia usaha, tetapi sebagai kerangka strategis untuk membangun ekosistem bisnis Indonesia yang produktif, adaptif, inklusif, dan kompetitif dalam jangka panjang.

Kata kunci: kebijakan usaha berkelanjutan; SDGs; UMKM; ekosistem bisnis; inklusivitas; daya saing; ekonomi hijau.

Abstract. Indonesia's economic development faces the challenge of maintaining economic growth while ensuring social, economic, and environmental sustainability. Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have a strategic position in addressing these challenges because they encompass around 99% of business units, contribute approximately 60.51% to the Gross Domestic Product (GDP), and absorb nearly 97% of the national workforce. However, the significant role of MSMEs has not yet been fully matched by their ability to integrate sustainability principles, green innovation, digitalisation, social inclusion, and resource efficiency into their business models. This research aims to analyse how business development policies based on Sustainable Development Goals (SDGs) can be used as a strategy to strengthen an inclusive and competitive business ecosystem in Indonesia. The research uses a qualitative approach through document analysis of government policies, official reports from the Central Statistics Agency (BPS), the National Development Planning Agency (Bappenas), the Financial Services Authority, the Ministry of Energy and Mineral Resources, as well as national and international scientific literature. The analysis was conducted through data reduction, thematic categorisation, interpretation, and source triangulation. The study is also supported by bibliometric evidence based on VOSviewer from previous research on SDGs and business. The research findings indicate that sustainable business development policies need to shift from a business aid approach to ecosystem development that integrates sustainable financing, digitalisation, innovation, inclusive value chains, circular economy, strengthening human resource capacity, standardisation, and partnerships among government, private sector, academia, and society. The research identified five strategic pillars: policy and governance, sustainable financing, digital transformation and innovation, value chain inclusion, and green and circular economy. Strengthening these five pillars can enhance the ability of businesses to create economic value as well as social and environmental value. Thus, the implementation of the SDGs should

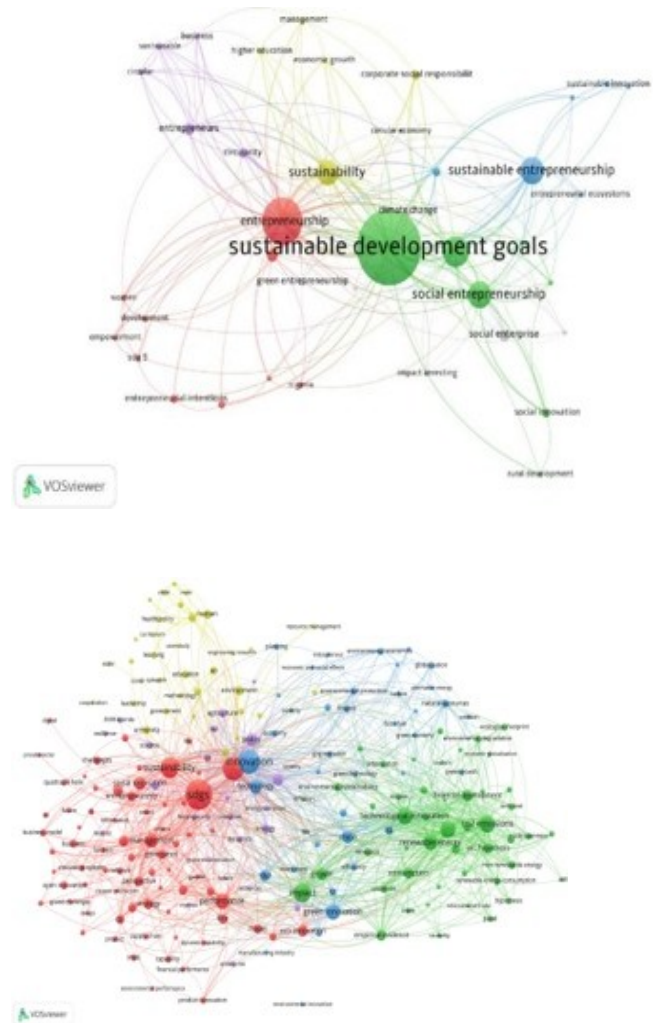
not be positioned as an additional agenda for the business world, but as a strategic framework to build a productive, adaptive, inclusive, and competitive Indonesian business ecosystem in the long term.

Keywords: sustainable business policies; SDGs; MSMEs; business ecosystem; inclusivity; competitiveness; green economy.

PENDAHULUAN

Agenda pembangunan ekonomi Indonesia memasuki fase yang semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi cukup diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga melalui kemampuan ekonomi menghasilkan kesejahteraan yang inklusif, mengurangi kesenjangan, menjaga daya dukung lingkungan, dan menciptakan ketahanan terhadap berbagai guncangan. Perubahan iklim, digitalisasi, ketidakpastian geopolitik, perubahan pola konsumsi, tekanan terhadap sumber daya alam, serta meningkatnya tuntutan konsumen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab telah mengubah lingkungan persaingan usaha secara fundamental. (Bappenas, 2024; United Nations, 2015, 2023)

Dalam konteks tersebut, Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menyediakan kerangka global yang dapat menghubungkan agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi dunia usaha, SDGs tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga dapat menjadi kerangka strategis untuk membangun inovasi, efisiensi, model bisnis baru, akses pasar, reputasi, dan daya saing. Literatur bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai hubungan SDGs dan dunia bisnis berkembang pesat setelah 2015. Analisis terhadap 2.366 publikasi periode 1992–2022 menemukan bahwa produksi ilmiah mengenai SDGs pada tingkat bisnis meningkat sangat tajam, dari 73 publikasi pada 2015 menjadi 463 publikasi pada 2022. (United Nations, 2015; Schaltegger, Lüdeke-Freund, & Hansen, 2016)

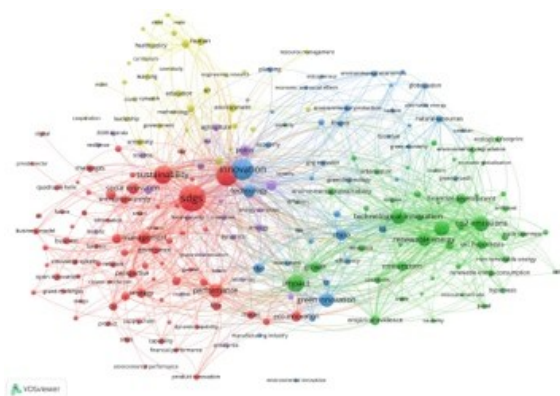


Gambar 1. Peta VOSviewer mengenai keterkaitan SDGs (publikasi 186 terindeks Scopus periode 2016–2023)

Temuan tersebut diata menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma dalam kajian bisnis. Keberlanjutan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan, tetapi semakin terhubung dengan performance, innovation, strategy, competitive advantage, governance, entrepreneurship, circular economy, dan corporate sustainability. Dalam studi bibliometrik tersebut, kata kunci

sustainability memiliki frekuensi 426, sustainable development 402, Sustainable Development Goals 268, performance 263, innovation 228, business 146, corporate social responsibility 140, governance 119, entrepreneurship 91, dan strategy 90. (Martínez-Falcó et al., 2023).

Sedangkan Representasi VOSviewer dari penelitian bibliometrik mengenai SDGs dan sustainable entrepreneurship. Peta tersebut menunjukkan keterhubungan sustainable development goals dengan sustainability, entrepreneurship, sustainable entrepreneurship, social entrepreneurship, circular economy, corporate social responsibility, climate change, dan sustainable innovation. Studi sumber menggunakan 186 publikasi terindeks Scopus periode 2016–2023. (Wahyudi et al., 2025; Martínez-Falcó et al., 2023)



Gambar 2. Peta VOSviewer kewirausahaan berkelanjutan (publikasi 186 terindeks Scopus periode 2016–2023)

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa SDGs berada pada posisi konseptual yang menghubungkan berbagai tema bisnis berkelanjutan. Sustainable entrepreneurship terhubung dengan sustainable innovation, sedangkan social entrepreneurship berhubungan dengan social innovation dan rural development. Pada sisi lain, circular economy, corporate social responsibility, dan climate change berfungsi sebagai konsep penghubung antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini memperkuat

argumentasi bahwa pembangunan usaha berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi membutuhkan integrasi berbagai aktor dan kebijakan. (Wahyudi et al., 2025; Schaltegger et al., 2016)

Pada hasil bibliometrik lainnya juga menunjukkan bahwa penelitian SDGs dalam bidang bisnis telah membentuk beberapa kluster utama. Analisis VOSviewer terhadap literatur bisnis dan SDGs menemukan sedikitnya sepuluh kluster tematik, dengan tema utama meliputi sustainability, performance, innovation, entrepreneurship, corporate social responsibility, SDGs, barriers, benefits, integration, dan social impact. (Martínez-Falcó et al., 2023)

Temuan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Perekonomian Indonesia pada 2024 tumbuh 5,03%, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139 triliun dan PDB per kapita sekitar Rp78,6 juta. Pertumbuhan tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, tetapi kualitas pertumbuhan perlu terus diperkuat agar menghasilkan manfaat yang lebih merata dan berkelanjutan. (Badan Pusat Statistik, 2025a)

Salah satu aktor utama dalam proses tersebut adalah UMKM. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa UMKM mencakup sekitar 99% unit usaha Indonesia, memberikan kontribusi 60,51% terhadap PDB, dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih sekitar 15,7%, lebih rendah dibandingkan Singapura sebesar 41% dan Thailand sebesar 29%. Data tersebut memperlihatkan adanya paradoks: UMKM sangat besar dari sisi jumlah dan penyerapan tenaga kerja, tetapi belum optimal dari sisi produktivitas, integrasi rantai pasok global, inovasi, standarisasi, dan ekspor. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024)

Persoalan lain adalah struktur usaha Indonesia yang sangat didominasi usaha mikro. Kajian World Bank menunjukkan bahwa sekitar 99% perusahaan Indonesia merupakan MSME dan sekitar 98,7% establishment pada 2023 berada dalam kategori usaha mikro. Sebagian besar usaha mikro juga memiliki orientasi subsistensi dan jumlah pekerja yang sangat terbatas. Kondisi ini penting karena strategi keberlanjutan yang dirancang untuk perusahaan besar tidak dapat secara langsung diterapkan kepada usaha mikro tanpa mempertimbangkan kapasitas finansial, teknologi, sumber daya manusia, dan tingkat formalitasnya. (World Bank, 2026; Badan Pusat Statistik, 2025c)

Kesenjangan pembiayaan juga menjadi persoalan penting. Roadmap pengembangan SDGs Indonesia menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap layanan keuangan berada pada baseline 24,4% pada 2019. Dengan skenario intervensi, akses tersebut diproyeksikan mencapai 41,6% pada 2030, dibandingkan 31,1% dalam skenario business as usual. OJK juga mencatat adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UMKM. Estimasi yang dikutip dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024–2028 menunjukkan kebutuhan pembiayaan UMKM dapat mencapai Rp4.300 triliun pada 2026, sementara suplai diperkirakan sekitar Rp1.900 triliun. (Bappenas, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Persoalan pengembangan usaha tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbesar kredit atau memberikan bantuan modal. Kebijakan perlu membangun ekosistem yang memungkinkan usaha memperoleh modal, teknologi, pengetahuan, pasar, tenaga kerja berkualitas, jaringan usaha, dan insentif untuk menerapkan praktik berkelanjutan. (Freeman, 1984; Porter & Kramer, 2011)

Digitalisasi menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem tersebut. BPS mencatat bahwa 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, meningkat dari 69,21% pada 2023. Sektor informasi dan komunikasi juga tumbuh 7,57% pada 2024. Peningkatan konektivitas tersebut menciptakan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar, mengembangkan perdagangan digital, menggunakan pembayaran digital, mengakses layanan keuangan, dan memperoleh informasi mengenai teknologi serta pasar. (Badan Pusat Statistik, 2025b)

Namun, digitalisasi tidak otomatis menghasilkan keberlanjutan. Digitalisasi harus dikombinasikan dengan transformasi proses bisnis, peningkatan produktivitas, pengelolaan data, keamanan digital, inovasi produk, serta kemampuan sumber daya manusia. Dengan kata lain, go digital perlu diarahkan menjadi digital sustainability.

Dimensi lingkungan juga semakin penting. Indonesia memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030. Pemerintah juga menargetkan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Dalam kondisi tersebut, dunia usaha termasuk UMKM perlu dilibatkan dalam transisi energi, efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan ekonomi sirkular. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024).

Kebijakan tersebut semakin relevan karena struktur konsumsi dan produksi Indonesia menghasilkan tekanan lingkungan yang besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa pada 2024, pelaporan dari 37 perusahaan manufaktur menghasilkan realisasi timbulan sampah lebih dari 627 ribu ton, sementara realisasi pengurangan sampah sekitar 219 ribu ton pada kelompok perusahaan yang

melaporkan. Data ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi sirkular, efisiensi material, desain produk, reuse, recycle, dan tanggung jawab produsen perlu menjadi bagian dari ekosistem usaha. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024; Geissdoerfer et al., 2017).

Pada kebijakan nasional, perkembangan tersebut sejalan dengan Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2025 yang menggunakan tema *Fostering Inclusive Growth: Advancing a Sustainable and Resilient Indonesia*. VNR tersebut secara khusus menempatkan SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta SDG 17 tentang kemitraan sebagai dua dari lima tujuan yang menjadi fokus utama. Pemerintah juga menegaskan prinsip *no one left behind* dalam pelaksanaan SDGs. (Bappenas, 2025a) VNR Indonesia 2025 melaporkan bahwa 61,4% indikator SDGs nasional telah mencapai kondisi yang dinilai sesuai arah target, sekaligus menunjukkan masih adanya kesenjangan yang memerlukan percepatan. Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar merumuskan komitmen SDGs, tetapi memastikan bahwa SDGs diterjemahkan ke dalam kebijakan sektoral, praktik bisnis, pembiayaan, inovasi, dan mekanisme pasar. (Bappenas, 2025a, 2025b)

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pengembangan usaha berkelanjutan berbasis SDGs sebagai strategi untuk memperkuat dan mengidentifikasi ekosistem bisnis serta tantangan implementasinya, dengan merumuskan kerangka strategis penguatan ekosistem bisnis Indonesia melalui integrasi kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan, digitalisasi, pembiayaan, inovasi, dan kemitraan. Studi ini mengisi research gap berupa masih terbatasnya kajian yang secara sistematis mengintegrasikan berbagai dimensi

tersebut ke dalam perspektif ekosistem bisnis berbasis SDGs, karena penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan aspek kebijakan, keberlanjutan, digitalisasi, pembiayaan, dan inovasi sebagai isu yang berdiri sendiri. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada sintesis konseptual yang menghasilkan kerangka strategis integratif untuk menjelaskan bagaimana sinergi kebijakan dan berbagai aktor ekosistem dapat memperkuat inklusivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha di Indonesia.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis dokumen dan kajian literatur terarah. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan memahami bagaimana kebijakan pengembangan usaha berkelanjutan dibangun, diimplementasikan, dan dihubungkan dengan pencapaian SDGs serta penguatan ekosistem bisnis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menginterpretasikan kebijakan bukan hanya berdasarkan isi regulasi, tetapi juga berdasarkan konteks ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta karakteristik pelaku usaha. Analisis diarahkan pada pertanyaan: apa kebijakan yang telah tersedia, masalah apa yang masih muncul, bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan SDGs, dan bagaimana kebijakan dapat dikembangkan menjadi ekosistem usaha yang lebih inklusif dan kompetitif. Data penelitian terdiri atas data sekunder yang berasal dari empat kelompok sumber yaitu, Pertama, dokumen kebijakan dan laporan pemerintah, meliputi dokumen SDGs Indonesia, VNR Indonesia 2025, Roadmap SDGs Indonesia 2023–2030, dokumen BPS, dokumen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, Kementerian ESDM, dan dokumen terkait

ekonomi sirkular. Kedua, literatur ilmiah, khususnya artikel mengenai sustainable business, sustainable entrepreneurship, sustainable development, UMKM, circular economy, green innovation, digital transformation, ESG, dan business ecosystem. Ketiga, data statistik kuantitatif digunakan untuk memberikan konteks empiris terhadap analisis kualitatif. Data tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, kontribusi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor, penetrasi internet, pembiayaan UMKM, indikator energi dan emisi, serta capaian SDGs. Keempat, data bibliometrik sekunder berbasis VOSviewer digunakan sebagai penguat identifikasi tren penelitian. Penelitian Martínez-Falcó et al. menganalisis 2.366 dokumen Web of Science periode 1992–2022, sedangkan penelitian mengenai sustainable entrepreneurship menggunakan 186 publikasi Scopus periode 2016–2023.

Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama berupa identifikasi dan seleksi dokumen berdasarkan kata kunci sustainable business, SDGs, MSMEs, sustainable entrepreneurship, business ecosystem, green innovation, circular economy, dan inclusive business. Dokumen yang dianalisis mencakup artikel jurnal, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga terkait pada periode 2020–2025. Seleksi dilakukan berdasarkan relevansi substantif, ketersediaan teks lengkap, dan keterkaitan dengan pengembangan usaha berkelanjutan berbasis SDGs. Tahap kedua berupa reduksi dan kategorisasi tematik, dengan menyeleksi informasi yang relevan, melakukan pengodean, mengelompokkan kode berdasarkan kesamaan konsep, dan membangun tema utama yang meliputi kebijakan, ekonomi, sosial, lingkungan, digitalisasi, pembiayaan, inovasi, dan kemitraan. Tahap ketiga berupa interpretasi, sintesis, dan triangulasi

sumber, yaitu membandingkan temuan antardokumen dan antarsumber untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, persamaan, dan perbedaan temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan artikel akademik, dokumen pemerintah, serta laporan lembaga internasional/institusi terkait untuk meningkatkan kredibilitas hasil. Analisis menghasilkan sintesis tematik yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan kerangka strategis penguatan ekosistem bisnis Indonesia berbasis SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran paradigma dari pengembangan usaha menuju ekosistem usaha berkelanjutan

Temuan dari sumber sekunder. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan usaha selama ini banyak diarahkan pada peningkatan jumlah usaha, akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan perluasan pemasaran. Pada saat yang sama, literatur mengenai business ecosystem menempatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, konsumen, pemasok, perusahaan besar, perguruan tinggi, lembaga penelitian, platform digital, komunitas, dan masyarakat sebagai aktor yang saling berinteraksi dalam penciptaan nilai. Perspektif stakeholder juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas organisasi (Freeman, 1984; Schaltegger et al., 2016).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menginterpretasikan bahwa pendekatan pengembangan usaha yang hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas individual pelaku usaha belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas keberlanjutan. Keberlanjutan usaha perlu dipahami sebagai hasil interaksi antareleman dalam ekosistem, bukan semata-mata sebagai kemampuan internal

perusahaan. Dengan demikian, kontribusi analitis penelitian ini adalah memposisikan kebijakan pemerintah sebagai instrumen orkestrasi ekosistem, yaitu menghubungkan dan menyelaraskan berbagai aktor agar menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.

SDGs sebagai kerangka kebijakan pengembangan usaha

Dari 17 SDGs, terdapat beberapa tujuan yang memiliki hubungan paling langsung dengan pengembangan usaha.

Tabel 1. Relevansi SDGs terhadap pengembangan ekosistem bisnis

SDGs	Relevansi Terhadap Dunia Kerja
SDGs 1	Pengurangan kemiskinan melalui penciptaan pendapatan dan kewirausahaan
SDGs 5	Kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi
SDGs 8	Pekerjaan layak, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
SDGs 9	Infrastruktur, industrialisasi dan inovasi
SDGs 10	Pengurangan kesenjangan dan inklusi ekonomi
SDGs 12	Produksi dan konsumsi berkelanjutan
SDGs 13	Aksi perubahan iklim
SDGs 16	Tata kelola, kepastian hukum dan institusi
SDGs 17	Kemitraan pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat

Temuan dari sumber sekunder. Analisis dokumen menunjukkan bahwa SDG 8 berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, SDG 9 dengan industri, inovasi, dan infrastruktur, SDG 12 dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, SDG 13 dengan aksi perubahan iklim, dan SDG 17 dengan kemitraan. Dokumen *Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2025* juga memberikan perhatian terhadap pencapaian SDG 8 dan SDG 17, termasuk dukungan terhadap UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan digital, dan penguatan kemitraan (United Nations, 2015; Bappenas, 2025a). Temuan

tersebut menunjukkan bahwa SDGs tidak hanya dapat digunakan sebagai agenda pembangunan makro, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kerangka integratif bagi kebijakan pengembangan usaha. Penelitian ini selanjutnya menginterpretasikan bahwa keterkaitan SDG 8, 9, 12, 13, dan 17 dapat menjadi dasar untuk menggeser orientasi kebijakan dari sekadar pertumbuhan jumlah dan kapasitas usaha menuju pembangunan ekosistem yang produktif, inovatif, inklusif, dan rendah dampak lingkungan.

Posisi strategis UMKM dalam ekosistem ekonomi Indonesia

Besarnya peran UMKM membuat kebijakan keberlanjutan yang tidak melibatkan UMKM berpotensi menghasilkan dampak yang terbatas. Data pemerintah menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sekitar 60,51% terhadap PDB dan hampir 97% terhadap penyerapan tenaga kerja. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024; World Bank, 2026)

Tabel 2. Indikator strategis UMKM Indonesia

Indikator	Nilai
Perkiraan proporsi unit usaha	±99%
Kontribusi terhadap PDB	60,51%
Penyerapan tenaga kerja	±97%
Kontribusi terhadap ekspor nasional	±15,7%
Jumlah UMKM yang pernah dilaporkan pemerintah	±64,2 juta

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Data di atas diinterpretasikan bahwa UMKM bukan merupakan aktor perifer, melainkan salah satu fondasi utama ekosistem ekonomi Indonesia. Namun, dominasi usaha mikro juga menunjukkan adanya heterogenitas kapasitas yang perlu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan prinsip **proportional sustainability**, yaitu penerapan target dan instrumen keberlanjutan secara bertahap sesuai kapasitas, ukuran, sektor, dan tingkat

kesiapan usaha. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan keberlanjutan tidak menjadi beban regulasi yang justru memperlebar kesenjangan antara usaha besar dan usaha mikro.

Data tersebut juga menghasilkan implikasi kebijakan yang penting. Pertama, UMKM bukan sektor perifer, tetapi merupakan fondasi ekonomi nasional. Kedua, peningkatan daya saing UMKM berpotensi memberikan dampak makroekonomi yang signifikan. Ketiga, transformasi keberlanjutan tidak akan berhasil apabila hanya diarahkan kepada korporasi besar. Namun, besarnya jumlah UMKM juga menimbulkan tantangan. Sebagian besar merupakan usaha mikro dengan kapasitas manajemen, modal, teknologi, dan tenaga kerja yang terbatas. World Bank mencatat bahwa 98,7% establishment Indonesia pada 2023 merupakan usaha mikro. Karena itu, kebijakan SDGs harus menerapkan prinsip *proportional sustainability*. Standar keberlanjutan harus diterapkan secara bertahap berdasarkan kapasitas usaha. (World Bank, 2026; Venkataraman, 1997)

Pilar pertama: kebijakan dan tata kelola yang terintegrasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama kebijakan pengembangan usaha adalah potensi fragmentasi. Program pembiayaan, digitalisasi, pelatihan, ekspor, sertifikasi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sering berada dalam institusi atau program yang berbeda. Pendekatan berbasis SDGs memerlukan integrasi dalam program pembiayaan UMKM dengan tidak hanya menilai kemampuan membayar, tetapi juga memberikan insentif bagi usaha yang melakukan efisiensi energi, mengurangi limbah, mempekerjakan tenaga kerja rentan, menggunakan bahan baku lokal, atau mengembangkan produk hijau. Begitu pula program digitalisasi seharusnya tidak berhenti pada penggunaan media sosial atau marketplace. Digitalisasi perlu diarahkan

pada digital business transformation, meliputi manajemen inventori, pencatatan keuangan, customer relationship management, analitik data, pembayaran digital, supply chain management, dan pelaporan keberlanjutan. Integrasi kebijakan juga diperlukan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki posisi penting karena sebagian besar aktivitas UMKM berlangsung pada tingkat lokal. (Freeman, 1984; Schaltegger et al., 2016)

Pilar kedua: pembiayaan berkelanjutan

Pembiayaan merupakan salah satu faktor paling penting dalam transformasi usaha. Tanpa modal, UMKM sulit membeli mesin hemat energi, mengembangkan kemasan ramah lingkungan, memperoleh sertifikasi, meningkatkan kualitas produk, atau mengadopsi teknologi digital. Masalahnya, kebutuhan pembiayaan UMKM jauh lebih besar daripada kapasitas pembiayaan yang tersedia. OJK memperkirakan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan dan pasokan pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, pembiayaan perlu bergerak menuju *sustainable finance for SMEs* dengan skema yang mencakup kredit hijau bagi UMKM; subsidi bunga untuk investasi teknologi bersih; *blended finance*; *impact investment*; *green sukuk*; penjaminan kredit hijau; *crowdfunding* berbasis dampak; insentif fiskal bagi usaha yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Dengan adanya roadmap SDGs Indonesia menunjukkan bahwa dengan intervensi kebijakan, akses UMKM terhadap layanan keuangan dapat meningkat hingga 41,6% pada 2030, dibandingkan 31,1% dalam skenario *business as usual* yang dimana pembiayaan harus diposisikan bukan hanya sebagai *capital injection*, tetapi sebagai instrumen perubahan perilaku usaha. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Bappenas, 2024)

Pilar ketiga: transformasi digital dan inovasi berkelanjutan

Data BPS menunjukkan 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada

2024. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 7,57% pada tahun yang sama yang berarti memberikan peluang besar bagi UMKM. Digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, meningkatkan transparansi, dan mempercepat inovasi. Transformasi digital harus dikaitkan dengan SDGs. Oleh sebab itu, kebijakan digitalisasi UMKM sebaiknya tidak menggunakan indikator semata-mata berupa jumlah UMKM yang masuk marketplace. Indikator harus berkembang menuju produktivitas digital, pertumbuhan omzet, efisiensi biaya, kemampuan ekspor, inovasi, dan dampak lingkungan. (Badan Pusat Statistik, 2025b; Suyuti et al., 2025).

Pilar keempat: membangun rantai nilai yang inklusif

Daya saing UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual produk, tetapi juga kemampuan masuk ke dalam rantai nilai yang lebih besar. Data kontribusi UMKM terhadap ekspor sekitar 15,7% menunjukkan bahwa masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan integrasi UMKM ke pasar internasional. Strategi pengembangan rantai nilai dapat dilakukan melalui, supplier development program; kemitraan UMKM dengan perusahaan besar; off-taker agreement; standardisasi kualitas; sertifikasi; digitalisasi rantai pasok; pengembangan kawasan industri; local content development; akses ke pengadaan pemerintah. Konsep ini juga berkaitan dengan SDG 17. Kemitraan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan transfer teknologi, pasar, pengetahuan, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas. Perusahaan besar dapat berperan sebagai anchor firm, sementara UMKM menjadi pemasok atau mitra lokal. Perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan teknologi. Pemerintah menyediakan regulasi, insentif, dan infrastruktur. (Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024; Freeman, 1984).

Pilar kelima: ekonomi hijau dan ekonomi sirkular

Perubahan menuju ekonomi hijau merupakan salah satu transformasi paling penting dalam pengembangan usaha masa depan. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi dan net zero emission. Kementerian ESDM menyebutkan target NZE Indonesia pada 2060 atau lebih cepat, dengan strategi efisiensi energi dan peningkatan energi terbarukan. Bagi dunia usaha, transisi tersebut menciptakan dua sisi. Di satu sisi, terdapat biaya transisi. UMKM harus membeli teknologi baru, mengubah proses produksi, menggunakan bahan baku alternatif, dan mungkin menghadapi biaya sertifikasi. Di sisi lain, terdapat peluang ekonomi baru melalui: produk ramah lingkungan; energi terbarukan; jasa lingkungan; daur ulang; repair economy; refill business; sharing economy; produk berbasis limbah; desain produk berkelanjutan; green tourism; pertanian berkelanjutan. Karena itu, kebijakan seharusnya tidak melihat ekonomi hijau sebagai beban regulasi, tetapi sebagai sumber inovasi dan pasar baru. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024; Geissdoerfer et al., 2017).

Inklusivitas sebagai inti kebijakan usaha berkelanjutan

Keberlanjutan tidak hanya berarti lingkungan. Sebuah bisnis dapat menggunakan teknologi hijau tetapi tetap tidak inklusif apabila hanya memberikan manfaat kepada kelompok ekonomi tertentu. Karena itu, kebijakan harus mengintegrasikan dimensi sosial. Inklusivitas dapat mencakup: perempuan; pemuda; penyandang disabilitas; masyarakat pedesaan; kelompok berpendapatan rendah; usaha informal yang sedang berproses menuju formalitas; pelaku usaha di wilayah tertinggal; komunitas

lokal. VNR Indonesia 2025 menegaskan prinsip no one left behind dalam implementasi SDGs. Dalam perspektif bisnis, inklusivitas bukan hanya kewajiban sosial. Inklusivitas dapat memperluas basis konsumen, sumber tenaga kerja, pemasok, inovasi, dan pasar. Konsep inclusive business menempatkan kelompok berpendapatan rendah bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga sebagai konsumen, produsen, distributor, pekerja, atau mitra usaha. (Elkington, 1997; Porter & Kramer, 2011; Wahyudi et al., 2025)

Peran pemerintah sebagai orkestrator ekosistem

Pemerintah memiliki posisi strategis sebagai orkestrator ekosistem bisnis dalam mendorong pengembangan usaha berkelanjutan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), karena keberhasilan transformasi usaha tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal pelaku usaha, tetapi juga oleh kualitas regulasi, akses sumber daya, jaringan kemitraan, dan kondisi lingkungan bisnis. Sebagai regulator, pemerintah perlu menyediakan kerangka regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas usaha; sebagai fasilitator, pemerintah berperan memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, informasi, dan pasar; sebagai market maker, pemerintah dapat menciptakan permintaan melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa publik yang memberikan ruang lebih besar bagi produk dan layanan UMKM berkelanjutan; sebagai risk absorber, pemerintah dapat menurunkan risiko investasi melalui skema penjaminan, subsidi, insentif fiskal, maupun pembiayaan campuran (blended finance) untuk mendorong adopsi teknologi hijau dan inovasi berkelanjutan; sebagai knowledge broker, pemerintah berfungsi

menghubungkan UMKM dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, perusahaan besar, lembaga keuangan, serta konsultan guna mempercepat transfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi; sedangkan sebagai evaluator, pemerintah perlu membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis kinerja yang tidak berhenti pada pengukuran jumlah penerima program, tetapi mencakup peningkatan produktivitas, pendapatan usaha, penciptaan pekerjaan layak, inklusi ekonomi, inovasi, ekspor, efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan ketahanan usaha. Dengan menjalankan keenam fungsi tersebut secara terpadu, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai pengarah, penghubung, dan penguat interaksi antaraktor dalam ekosistem bisnis, sehingga kebijakan pengembangan usaha berbasis SDGs mampu menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan serta memperkuat daya saing usaha dalam jangka panjang. (Freeman, 1984; Porter & Kramer, 2011).

Integrasi kebijakan pembiayaan dan keberlanjutan

Integrasi kebijakan pembiayaan dan keberlanjutan merupakan instrumen penting dalam mendorong transformasi usaha menuju praktik bisnis yang lebih inklusif, produktif, dan berwawasan lingkungan. Kebijakan pembiayaan perlu dirancang tidak semata-mata berdasarkan kemampuan usaha dalam memenuhi persyaratan administratif dan kemampuan pengembalian kredit, tetapi juga mempertimbangkan kinerja keberlanjutan (*sustainability performance*) sebagai bagian dari mekanisme pemberian insentif. Dalam konteks ini, pemerintah bersama lembaga keuangan dapat mengembangkan skema pembiayaan yang memberikan keuntungan lebih besar kepada pelaku usaha yang melakukan investasi pada mesin hemat energi, menggunakan bahan baku ramah lingkungan atau material daur ulang,

mengurangi limbah dan emisi, menerapkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta membuka kesempatan kerja bagi kelompok rentan. Bentuk insentif dapat berupa penurunan tingkat bunga, subsidi bunga, peningkatan plafon pembiayaan, penjaminan kredit, masa tenggang yang lebih panjang, maupun akses terhadap skema green financing dan blended finance. Pendekatan tersebut mengubah fungsi pembiayaan dari sekadar instrumen penyediaan modal menjadi instrumen kebijakan untuk memengaruhi perilaku dan keputusan investasi pelaku usaha. Dengan insentif kebijakan menciptakan dorongan bagi pelaku usaha untuk menginternalisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam keputusan bisnisnya. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak berhenti pada distribusi dana atau peningkatan akses kredit, tetapi diarahkan untuk menghasilkan perubahan struktural melalui peningkatan kualitas investasi, efisiensi sumber daya, inovasi teknologi, penciptaan pekerjaan yang lebih inklusif, serta penguatan posisi usaha dalam rantai nilai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip SDGs, khususnya SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 9 mengenai industri, inovasi dan infrastruktur, SDG 10 mengenai pengurangan kesenjangan, serta SDG 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, sehingga pembiayaan dapat berfungsi sebagai leverage kebijakan untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Schaltegger, Burritt, & Petersen, 2003)

Dokumen dan literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa program pembiayaan, digitalisasi, pelatihan, ekspor, sertifikasi, lingkungan, dan pemberdayaan usaha sering dikembangkan melalui instrumen dan institusi yang berbeda. Literatur mengenai ekosistem dan keberlanjutan menekankan pentingnya

koordinasi antaraktor serta integrasi berbagai sumber daya dalam penciptaan nilai berkelanjutan.

Penelitian ini menginterpretasikan fragmentasi tersebut sebagai salah satu tantangan tata kelola dalam implementasi kebijakan usaha berbasis SDGs. Karena itu, integrasi kebijakan perlu dilakukan tidak hanya pada tingkat program, tetapi juga pada tingkat **indikator dan mekanisme insentif**. Misalnya, pembiayaan UMKM tidak hanya mengukur kemampuan membayar, tetapi dapat memasukkan efisiensi energi, pengurangan limbah, penggunaan bahan baku lokal, penciptaan pekerjaan inklusif, dan inovasi hijau sebagai bagian dari kinerja usaha.

Secara konseptual, mekanisme tersebut membentuk rantai transformasi seperti dibawah ini:

Kebijakan → insentif → perubahan perilaku → investasi berkelanjutan → inovasi → peningkatan produktivitas → daya saing usaha,

Penguatan sistem monitoring dan indikator keberlanjutan

Implementasi kebijakan SDGs membutuhkan indikator yang dapat diukur dengan tujuan agar Indikator tersebut dapat dikembangkan menjadi Sustainable Business Development Index (SBDI) pada tingkat nasional atau daerah. Dengan indikator semacam ini dapat menjadi sebuah instrumen evaluasi bagi pemerintah dalam mengetahui apakah suatu program benar-benar menghasilkan transformasi usaha. (United Nations, 2023; Bappenas, 2025a)

Tabel 3. Indikator yang direkomendasikan

Dimensi	Indikator
Ekonomi	Pertumbuhan omzet, produktivitas, profitabilitas
Sosial	Tenaga kerja, upah layak, inklusi perempuan
Lingkungan	Konsumsi energi, limbah, emisi
Digital	Penggunaan platform digital, pembayaran digital

Inovasi	Produk baru, proses baru, paten
Pasar	Ekspor, rantai pasok perusahaan besar
Keuangan	Akses kredit, green finance
Tata kelola	Legalitas, sertifikasi, pelaporan
Ketahanan	kemampuan bertahan terhadap krisis

Temuan dari sumber sekunder. Literatur dan dokumen kebijakan yang dianalisis menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan merupakan salah satu hambatan dalam proses transformasi keberlanjutan UMKM. Kebutuhan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan modal kerja, tetapi juga investasi teknologi hemat energi, sertifikasi, pengembangan produk ramah lingkungan, digitalisasi, dan peningkatan kualitas produksi. Dokumen OJK dan Bappenas juga menunjukkan pentingnya pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memandang pembiayaan bukan sekadar sebagai **capital injection**, melainkan sebagai **policy leverage** untuk mengubah perilaku investasi pelaku usaha. Dengan demikian, insentif pembiayaan dapat diarahkan kepada usaha yang menunjukkan peningkatan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan usaha berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki potensi besar untuk menjadi strategi penguatan ekosistem bisnis Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing. Potensi tersebut semakin penting karena UMKM merupakan fondasi struktur perekonomian Indonesia, dengan kontribusi sekitar 60,51% terhadap PDB dan hampir 97% terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, besarnya kontribusi tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, antara lain

produktivitas, akses pembiayaan, digitalisasi, inovasi, standardisasi, integrasi rantai nilai, dan akses terhadap pasar internasional. Berdasarkan sintesis literatur dan dokumen kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi **lima pilar utama penguatan ekosistem bisnis**, yaitu (1) tata kelola dan kebijakan yang terintegrasi, (2) pembiayaan berkelanjutan, (3) transformasi digital dan inovasi, (4) rantai nilai yang inklusif, dan (5) ekonomi hijau serta ekonomi sirkular. Kelima pilar tersebut perlu diperkuat melalui pengembangan sumber daya manusia, kemitraan multipihak, serta sistem data dan monitoring yang terintegrasi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan usaha perlu mempertimbangkan karakteristik UMKM Indonesia yang sangat didominasi oleh usaha mikro. Oleh karena itu, penerapan standar dan tuntutan keberlanjutan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan *one-size-fits-all*, tetapi perlu diterapkan secara bertahap berdasarkan ukuran, sektor, kapasitas, dan tingkat kematangan usaha. Dalam kerangka tersebut, pemerintah perlu menjalankan fungsi yang lebih luas, tidak hanya sebagai regulator dan fasilitator, tetapi juga sebagai *market maker*, *risk absorber*, *knowledge broker*, dan evaluator. Keberhasilan kebijakan pada akhirnya tidak cukup diukur berdasarkan jumlah UMKM yang menerima bantuan, memperoleh kredit, atau masuk ke platform digital, tetapi perlu dilihat dari perubahan kinerja yang lebih substantif, seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan, penciptaan pekerjaan layak, inovasi, perluasan akses ekspor, efisiensi energi, pengurangan limbah, inklusi perempuan dan kelompok rentan, serta peningkatan ketahanan usaha terhadap krisis. (Bappenas, 2025a; World Bank, 2026; Wahyudi et al., 2025).

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan,

digital, pembiayaan, inovasi, dan kemitraan ke dalam perspektif ekosistem bisnis berbasis SDGs. **Kontribusi utama penelitian terletak pada sintesis lima pilar strategis yang memandang keberlanjutan usaha bukan sebagai agenda tambahan, melainkan sebagai proses transformasi ekosistem yang membutuhkan keterhubungan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.** Dengan demikian, implementasi SDGs dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan kebijakan pengembangan usaha menuju pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya lebih produktif, tetapi juga lebih inklusif, tangguh, hijau, dan berdaya saing. (United Nations, 2015; Freeman, 1984; Porter & Kramer, 2011).

Keterbatasan penelitian terutama berkaitan dengan penggunaan pendekatan analisis dokumen dan sumber sekunder. Penelitian ini belum melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari pelaku UMKM, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perusahaan besar, maupun aktor ekosistem lainnya. Oleh karena itu, kerangka lima pilar yang dihasilkan merepresentasikan **sintesis dan interpretasi analitis berdasarkan literatur serta dokumen kebijakan**, bukan hasil pengujian empiris langsung terhadap hubungan kausal antarunsur dalam ekosistem bisnis. Selain itu, heterogenitas karakteristik UMKM antarsektor dan antarwilayah di Indonesia menyebabkan penerapan kerangka tersebut perlu mempertimbangkan konteks lokal dan tingkat kematangan masing-masing usaha.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris terhadap kerangka lima pilar yang diusulkan melalui pendekatan kuantitatif, misalnya menggunakan survei dan **Structural Equation Modeling (SEM)** untuk menguji hubungan antara integrasi kebijakan, pembiayaan berkelanjutan, transformasi digital, inovasi, rantai nilai inklusif, dan kinerja keberlanjutan UMKM.

Selain itu, studi kasus lapangan pada sektor atau wilayah tertentu dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana kelima pilar tersebut diimplementasikan dalam konteks yang berbeda serta mengidentifikasi mekanisme kolaborasi antaraktor secara lebih mendalam. **Penggabungan pendekatan kuantitatif dan studi kasus juga berpotensi menghasilkan validasi yang lebih kuat terhadap kerangka strategis yang dihasilkan penelitian ini serta memperjelas kondisi yang memungkinkan ekosistem bisnis berbasis SDGs berkembang secara efektif di Indonesia.**

PERNYATAAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM, Program Studi Administrasi Bisnis, Tim Peneliti, serta seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025a, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03 persen (c-to-c)*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen-c-to-c-ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen-y-on-y-ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen-q-to-q-.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2025b, August 29). Statistik telekomunikasi Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/telecommunication-statistics-in-indonesia-2024.html>.

- Badan Pusat Statistik. (2025c, September 16). *Profil industri mikro dan kecil 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/09/16/a83f105e49377d0a7434e62a/profile-of-micro-and-small-industry-2024.html>
- Bappenas. (2024). Roadmap of SDGs Indonesia 2023–2030. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2025a). *Indonesia voluntary national review 2025: Fostering inclusive growth—Advancing a sustainable and resilient Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2025b, July 23). *Indonesia strengthens global role through 2025 Voluntary National Review at UN HLPF*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://www.bappenas.go.id/index.php/en/berita/indonesia-perkuat-peran-global-melalui-voluntary-national-review-2025-di-hlpf-pbb-DPOQU>
- Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. *Journal of Cleaner Production*, 65, 42–56.
- Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy—A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Menko Airlangga: Pemerintah dukung bentuk kolaborasi baru agar UMKM Indonesia jadi bagian rantai pasok industri global.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). Pemerintah atur strategi tekan emisi dari sumber energi bersih.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Capaian kinerja pengurangan sampah oleh produsen tahun 2024.
- Martínez-Falcó, J., Marco-Lajara, B., Sánchez-García, E., & Millán-Tudela, L. A. (2023). Sustainable Development Goals in the business sphere: A bibliometric review. *Sustainability*, 15(6), 5075.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Roadmap pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro 2024–2028. Jakarta: OJK.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.
- Schaltegger, S., Burritt, R., & Petersen, H. (2003). *An introduction to corporate environmental management: Striving for sustainability*. Greenleaf Publishing.
- Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F., & Hansen, E. G. (2016). Business models for sustainability: A co-evolutionary analysis of sustainable entrepreneurship, innovation, and transformation. *Organization & Environment*, 29(3), 264–289.
- Suyuti, M. R., Siraj, M. L., & Aslinda. (2025). The role of entrepreneurship in the development of information technology-based small businesses in Makassar City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1454(1), 012043. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1454/1/012043>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

- United Nations. (2023). The Sustainable Development Goals Report 2023. United Nations.
- Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research. *Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth*, 3, 119–138.
- Wahyudi, T., Prasetyo, A. A. S., Wulandari, S. S., & Artanti, Y. (2025). Aligning MSMEs with the Triple Bottom Line: A systematic literature review on sustainable business implementation in Indonesia. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 9(1), 57–86.
- World Bank. (2026). Indonesia economic prospects and MSME development evidence. World Bank.